

**RASIONALISASI KONFLIK INTENASIONAL
TERHADAP EKONOMI GLOBAL**

Yustina Prita Andini

Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri

shandyhuda@gmail.com

ABSTRAK

Pengaruh paradigma realisme dalam hubungan internasional menjadikan difersifikasi makna tentang konflik. Selama ini konflik selalu di didikotomikan oleh sesuatu yang bersifat kontak fisik atau dalam konteks paling tinggi disebut perang. Oleh sebab itu konflik global sering di artikan pada satu sisi yang sifatnya high politic yang berkaitan erat dengan kepentingan nasional, walaupun sebenarnya kepentingan nasional itu adalah ilusi dan hanya generalisasi fenomena oleh aktor rasional. Konflik global yang dipahami dalam sesuatu yang berkaitan dengan ideologi, keamanan, dan militer sebagai instrument utama. Dalam hal ini ada penyempitan makna tentang batasan arti dari konflik itu sendiri. Akibatnya fokus intervensi konflik pun menggunakan instrument militer sebagai tekanan dari sebuah peristiwa konflik. Melihat fenomena kasus konflik global kontemporer saat ini tidak hanya di dominasi oleh perilaku asertif dari negara untuk merebut kepentingannya atau melakukan intervensi terhadap suatu konflik. Konflik global kontemporer berarti sesuatu kejadian yang isunya terinternasionalisasi dan proses penyelesaian dan manajemen konfliknya melibatkan aktor-aktor lainnya yang melebihi dua aktor yang berkonflik. Konsep konflik dan perang merupakan salah satu konsep tertua dalam hubungan internasional dan dapat dikatakan bahwa ilmu hubungan internasional didirikan karena mencari penyebab konflik, perang dan menjaga perdamaian, dimana muncul teori-teori tertua dalam hubungan internasional. (teori realisme dan idealisme) yang masing-masing memiliki perbedaan pandangan untuk mencegah perang dan memelihara perdamaian, teori realisme berpikir, kemungkinan mencapai perdamaian dapat dicapai melalui kekuatan militer dan keseimbangan kekuatan, sedangkan idealisme berpikir bahwa perdamaian dapat dicapai melalui kerjasama dan koordinasi dan melalui keadilan internasional.

Kata Kunci : *Rasionalisasi, Konflik Internasional, Ekonomi global*

ABSTRACT

The influence of the realism paradigm in international relations has diversified the meaning of conflict. So far conflict has always been dichotomized by something that is physical contact or in the highest context is called war. national interest, even though in fact the national interest is an illusion and only a generalization of phenomena by rational actors. Global conflicts are understood in terms of ideology, security and the military as the main instruments. In this case there is a narrowing of the meaning of the meaning of the conflict itself. As a result, the focus of conflict intervention is using military instruments as pressure from a conflict event. Seeing the phenomenon of contemporary global conflict cases today is not only dominated by assertive behavior from the state to seize its interests or intervene in a conflict. Contemporary global conflict means an event whose issue is internationalized and the process of solving and managing the conflict involves other actors that are more than two conflict actor. The concept of conflict and war is one of the oldest concepts in international relations and it can be said that the science of international relations was founded because it seeks the causes of conflict, war and maintaining peace, where the oldest theories in international relations emerge. (theories of realism and idealism) each of which has different views on preventing war and maintaining peace, the theory of realism thinks, the possibility of achieving peace can be achieved through military force and balance of power, while idealism thinks that peace can be achieved through cooperation and coordination and through international justice.

Keywords : *Rationalization, International Conflict, Global Economy*

PENDAHULUAN

Proses integrasi global, atau globalisasi ekonomi, yang terjadi sejak hampir 60 tahun silam telah berdampak signifikan pada pertumbuhan perdagangan antarnegara. Sebagai salah satu motor perkembangan ekonomi, perdagangan internasional terus digalakan agar semakin berjalan bebas dan tidak menemui berbagai hambatan. Proses liberalisasi ini berdampak pada meningkatnya nilai dan volume perdagangan internasional pada abad ini. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa nilai ekspor barang dan jasa global pada tahun 2019 telah mencapai angka US\$ 24,795 triliun atau tumbuh drastis dari angka US\$ 383,603 milyar pada tahun 1970 (World Bank, 2019a). Selain mengalami pertumbuhan drastis dari segi valuasinya, perdagangan internasional juga semakin memperlihatkan pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi global. Data Bank Dunia kembali menunjukkan bahwa pada tahun 2019 proporsi perdagangan global terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) global hampir mencapai 60,4 persen atau tumbuh drastis dari 27,3 persen pada tahun 1970 (World Bank, 2019c). Kontribusi perdagangan yang cukup besar ini turut berakibat pada semakin “sejahteranya” dunia yang dapat dilihat dari nominal PDB global pada tahun 2019 yang mencapai US\$

87,698 triliun atau meningkat secara pesat dari US\$ 2,961 triliun pada tahun 1970 (World Bank, 2019b).

Pengaruh paradigma realisme dalam hubungan internasional menjadikan difersifikasi makna tentang konflik. Selama ini konflik selalu di didikotomikan oleh sesuatu yang bersifat kontak fisik atau dalam konteks paling tinggi disebut perang. Oleh sebab itu konflik global sering di artikan pada satu sisi yang sifatnya high politic yang berkaitan erat dengan kepentingan nasional, walaupun sebenarnya kepentingan nasional itu adalah ilusi dan hanya generalisasi fenomena oleh aktor rasional. Konflik global yang dipahami dalam sesuatu yang berkaitan dengan ideologi, keamanan, dan militer sebagai instrument utama. Dalam hal ini ada penyempitan makna tentang batasan arti dari konflik itu sendiri. Akibatnya fokus intervensi konflik pun menggunakan instrument militer sebagai tekanan dari sebuah peristiwa konflik. Melihat fenomena kasus konflik global kontemporer saat ini tidak hanya di dominasi oleh perilaku asertif dari negara untuk merebut kepentingannya atau melakukan intervensi terhadap suatu konflik. Konflik global kontemporer berarti sesuatu kejadian yang isunya terinternasionalisasi dan proses penyelesaian dan manajemen konfliknya melibatkan aktor-aktor lain yang melebihi dua aktor yang berkonflik.

Aspek lain dari konflik internasional atas energi terletak pada perebutan pipa gas dan minyak, antara negara pengeksport dan negara transit, seperti (sengketa Rusia Ukraina) untuk pasokan gas Rusia ke Eropa Barat, di mana Rusia memasok sekitar seperempat gas yang dikonsumsi di Eropa dan sekitar 80% gas ini melewati tanah Ukraina sebelum tiba di EU3, Pada bulan Januari 2009, ketidaksepakatan ini mengakibatkan gangguan pasokan di banyak negara Eropa, dengan delapan belas negara Eropa melaporkan penurunan besar atau pemutusan total pasokan gas mereka diangkut melalui Ukraina dari Rusia, pada bulan Oktober 2009, ketidaksepakatan lain muncul tentang jumlah gas yang akan diimpor Ukraina dari Rusia pada tahun 2010. Sengketa dan ketegangan tentang transfer gas antara Rusia dan Ukraina ini jika terjadi lagi dapat menyebabkan pengurangan 25 % dari pasokan gas Uni Eropa, dan ini menyebabkan krisis gas di Eropa, mungkin mencerminkan ke semua pasar dunia, Perbedaan seperti itu bertaruh Misalnya negara-negara pengeksport energi dan antar negara transit dapat menyebabkan konflik di masa depan di tingkat internasional.

Krisis ini bermula pada November 2013 ketika Presiden Ukraina pada saat itu Victor Yanukovich menolak untuk menandatangani perjanjian kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa dan lebih memilih untuk menerima bantuan dari Federasi Rusia berupa pinjaman sebesar 15 miliar dolar AS dan potongan harga gas dari Rusia sebesar 30%. Kebijakan tersebut menyebabkan protes besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat Ukraina. Kestabilan politik Ukraina juga semakin memburuk dengan adanya kecenderungan sikap masyarakat Ukraina Barat yang berbeda dengan Ukraina Timur. Karena ketidakmampuan pemerintah kala itu dalam menjaga kestabilan negara maka, presiden Ukraina Victor Yanukovich resmi mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan sementara oleh Presiden Olexander Turchnyov lalu pada tahun 2015 digantikan lagi oleh Presiden Petro Poroshenco yang kemudian terbentuklah sebuah pemerintahan baru di Ukraina yang pro Uni Eropa. Kecenderungan tersebut menyebabkan Keamanan negara Federasi Rusia merasa terancam dengan adanya intervensi Uni Eropa dan Amerika Serikat yang tergabung dalam organisasi NATO. Sebagai upaya diplomasi pemerintah Rusia telah mengirimkan surat tuntutan kepada NATO, salah satu poin penting yang ingin disampaikan adalah menolak ide bergabungnya Ukraina kedalam organisasi tersebut

Pentingnya studi ini terkait dengan meningkatnya konflik internasional atas sumber daya energi, yang pada gilirannya merupakan cara yang hilang. Saat ini lebih dari 80% kebutuhan energi global dipenuhi oleh bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas dan batubara. Sayangnya, cadangan global dari sumber-sumber yang langka dan tidak dapat diperbarui ini sangat terbatas. Cadangan minyak terbukti global diperkirakan mencapai 1.188 miliar barel (satu barel setara dengan 160 liter) pada akhir tahun 2004. Pada tahun yang sama, cadangan terbukti gas ditemukan sekitar 6400 triliun kaki kubik (satu triliun kaki kubik). setara dengan 100 juta barel bahan bakar cair) dengan Federasi Rusia memiliki bagian terbesar. Menurut beberapa perkiraan, diperkirakan bahwa waktu penipisan sekitar 40 hingga 60 tahun untuk minyak, sementara gas kemungkinan akan bertahan sedikit di atas 100 tahun. Oleh karena itu, banyak negara di dunia yang mengkhawatirkan keamanan pasokan energi di masa depan, terutama yang sangat bergantung pada impor untuk kebutuhan minyak dan gasnya. Seperti India. Skenario suram ini terkait dengan harga minyak saat ini sekitar US \$ 80 / bbl. telah menjadikan energi sebagai subjek yang sangat topic.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep konflik dan perang merupakan salah satu konsep tertua dalam hubungan internasional dan dapat dikatakan bahwa ilmu hubungan internasional didirikan karena mencari penyebab konflik, perang dan menjaga perdamaian, dimana muncul teori-teori tertua dalam hubungan internasional. (teori realisme dan idealisme) yang masing-masing memiliki perbedaan pandangan untuk mencegah perang dan memelihara perdamaian, teori realisme berpikir, kemungkinan mencapai perdamaian dapat dicapai melalui kekuatan militer dan keseimbangan kekuatan, sedangkan idealisme berpikir bahwa perdamaian dapat dicapai melalui kerjasama dan koordinasi dan melalui keadilan internasional. Hukum internasional membedakan antara tiga bentuk konflik internasional, konflik bersenjata internasional, konflik bersenjata internasional, dan konflik bersenjata non-internasional. Menurut Konvensi Jenewa 1949, pasal umum 2 menyatakan bahwa "semua kasus perang yang dideklarasikan atau konflik bersenjata apa pun yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak kontrak tinggi, bahkan jika keadaan perang tidak diakui, konvensi tersebut juga akan berlaku untuk semua kasus pendudukan sebagian atau total wilayah pihak yang mengadakan kontrak tinggi bahkan jika pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata " (Konvensi Jenewa, 1949, pasal 2 Artinya bahwa terjadinya konflik bersenjata internasional sudah jelas, yaitu akan menjadi konflik antara angkatan bersenjata resmi dari dua negara yang berbeda. Konflik bersenjata non-internasional, menurut pasal umum 3 Konvensi Jenewa, adalah „konflik bersenjata yang bersifat non-internasional yang terjadi di salah satu pihak yang terikat kontrak Tinggi, seperti perselisihan dan pemogokan domestik. Konsep konflik dalam literatur khusus politik dipandang "sebagai fenomena dinamis, konsep tersebut mengisyaratkan" posisi kompetitif tertentu, masing-masing pihak yang berinteraksi tidak sesuai dalam situasi potensial masa depan, karena masing-masing juga merasa harus mengambil sikap yang tidak sesuai dengan kepentingan yang dirasakan pihak lain, Jadi ada kecenderungan keluar untuk fokus pada posisi dimensi kompetitif dalam definisi konflik karena itu adalah "bentuk perilaku kompetitif antara individu atau kelompok," dan itu "biasanya apa yang terjadi ketika dua pihak atau lebih bersaing tentang tujuan yang tidak sesuai, apakah tujuan tersebut fakta atau persepsi, atau tentang sumber daya yang terbatas "

Kronologi Konflik Ukraina-Rusia

Krisis ini bermula pada November 2013 ketika Presiden Ukraina pada saat itu Victor Yanukovich menolak untuk menandatangani perjanjian kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa dan lebih memilih untuk menerima bantuan dari Rusia berupa pinjaman sebesar 15 miliar dolar AS dan potongan harga gas dari Rusia sebesar 30 persen.

Keputusan Yanukovich tersebut kemudian menuai protes dari masyarakat Ukraina yang pro Barat, protes tersebut berlangsung di Kiev dan terus berlanjut hingga tahun 2014. Seiring berjalannya waktu aksi tersebut berubah menjadi protes yang menggunakan kekerasan dan menyebabkan terbunuhnya puluhan demonstran dan ratusan orang mengalami dampak yang cukup signifikan. Berbagai upaya mediasi telah dilakukan, kesepakatan pembagian daerah kekuasaan dalam pemerintah Ukraina juga melibatkan beberapa mediator dari negara-negara di Eropa, antara lain Menteri Luar Negeri Prancis, Jerman dan Polandia. Tercapainya kesepakatan pembagian kekuasaan di Ukraina pada Februari 2014 nyatanya konflik sipil di Ukraina terus berlanjut.

Konflik menjadi semakin memanas karena Presiden Ukraina, Victor Yanukovich menghilang dari Kiev dan disusul dengan perilaku arogan para demonstran di beberapa Gedung pemerintahan Ukraina. Victor Yanukovich resmi turun dari jabatannya digantikan sementara oleh Presiden Olexander Turchnyov dan pada tahun 2015 lalu digantikan lagi oleh Presiden Petro Poroshenco yang kemudian terbentuklah sebuah pemerintahan baru di Ukraina yang pro Uni Eropa. Beralihnya kecenderungan politik Ukraina membuat Rusia menjadi semakin agresif karena usahanya untuk mendominasi Ukraina ternyata tidak berhasil.

Krisis Ukraina terkait masalah status Krimea juga berdampak pada sanksi Ekonomi bagi Rusia, sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Amerika dan Eropa berupa pelarangan pengiriman produk pertanian dan perikanan, seperti buah-buahan, daging, susu, ikan dan berbagai produk olahan lainnya, investasi, pariwisata, transportasi, energi, migas bahkan hingga sumber daya mineral. Letak geografis Ukraina merupakan teritori yang sangat strategis dimana dalam hal ini Ukraina berperan sebagai buffer zone atau yang lebih dikenal sebagai jalur pipa untuk penyaluran migas dari Rusia ke negara-negara di kawasan Eropa Barat. Berdasarkan data dari hampir dua per tiga penjualan gas Rusia ke Uni Eropa melalui pipa-pipa yang ditanam di bawah tanah Ukraina hal ini di

sepakati oleh Ukraina dan Rusia sebelum adanya konflik. Dampak dari krisis dua negara ini dirasakan juga oleh negara anggota Uni Eropa lainnya karena sikap politik pemerintah Rusia yang melakukan penutupan terhadap pasokan gas bagi negara-negara Uni Eropa yang menyebabkan krisis energi di Uni Eropa.

Perspektif Rusia dan Ukraina Terhadap Status Krimea.

Penggabungan Krimea ke Rusia adalah proses integrasi dari keseluruhan semenanjung Krimea yang dilaksanakan pada tahun 2014. Banyak negara barat menentang hal tersebut dan menyebutnya sebagai aneksasi atau agresi wilayah Krimea adalah hasil intervensi dari Rusia. Sejak tanggal 21 Maret 2014 Rusia memerintah Krimea sebagai dua subjek federal yaitu Republik Krimea dan kota Federal Sevastopol. Menurut Undang-undang Rusia, bergabungnya subyek- subyek federal baru diatur oleh undang-undang konstitusi federal pasal 65 ayat 2. Undang-undang ini diterima pada tahun 2001, dan menjelaskan bahwa bergabungnya sebuah negara baru atau bagian dari negara tersebut ke Rusia, akan berdasarkan kesepakatan bersama antara Federasi Rusia dan negara yang bersangkutan serta akan berlangsung sesuai dengan kesepakatan internasional antara dua negara. Selain itu, hal ini harus diawali oleh negara yang bersangkutan, bukan oleh suatu bagiannya atau oleh Rusia. Undang- undang ini mewajibkan Republik Krimea untuk memulai negosiasi bersangkutan dengan penggabungan Krimea ke Rusia. Atas alasan inilah Presiden Putin bersikeras akan mempertahankan Krimea dari Ukraina dan Barat.

Presiden Putin membantah tuduhan dari PBB akan keterlibatan Rusia dalam konflik di Ukraina, berlandaskan upaya untuk melindungi warga negaranya di Ukraina dan etnis Rusia yang ada di Krimea dari ancaman warga dan militer Ukraina. Perlahan tapi pasti akhirnya Krimea mengadakan referendum yang hasilnya 97,8% warga Krimea memilih untuk bergabung ke Rusia, di sisi lain Rusia mengemukakan keras bahwa proses integrasi ini dicap sebagai penganeksasian, karena hal ini menghina penduduk Semenanjung Krimea, dan menganggap proses ini sebagai integrasi Republik Krimea yang merdeka setelah Krimea dan Sevastopol bergabung dan meminta izin untuk masuk ke Rusia sesuai dengan pemilihan rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, yang menurut pendapat Rusia mencerminkan keinginan rakyat bergabung dengan negara yang lebih besar. Akan tetapi Ukraina membantah hal ini, karena Ukraina tidak mengakui kemerdekaan Republik Krimea atau integrasi tersebut dengan Rusia sebagai

hal yang sah secara hukum. Sidang Umum PBB juga menolak referendum Krimea dan menyatakan Krimea masuk dalam kategori penganeksasian oleh Rusia, PBB juga menyetujui sebuah resolusi yang tidak mengikat yang menekankan keutuhan wilayah Ukraina sesuai dengan perbatasan- perbatasannya yang telah diakui secara hukum internasional.

Selain itu Ukraina mengkritisi Undang-Undang Rusia pasal 65 ayat 2 dimana dalam Undang-undang tersebut berbunyi, “bergabungnya subyek-subyek federal baru diatur oleh undang-undang konstitusi negara federal.” Undang-undang ini menjabarkan bahwa bergabungnya sebuah negara baru atau bagian dari negara tersebut ke Rusia, akan berdasarkan kesepakatan bersama antara Federasi Rusia dan negara yang bersangkutan serta akan berlangsung sesuai dengan kesepakatan internasional antara dua negara. Selain itu, hal ini harus diawali oleh negara yang bersangkutan, bukan oleh suatu bagiannya atau oleh Rusia. Undang-undang ini nampaknya mewajibkan Ukraina untuk memulai negosiasi bersangkutan dengan penggabungan Krimea ke Rusia, bukan Krimea yang mengabaikan Ukraina sebagai negara induk dari kota Kiev.

Faktor lain yang membuat pemerintah Ukraina merasa yakin dan tidak mengakui Krimea sebagai bagian dari Rusia adalah Undang-Undang Ukraina Pasal 3, yang berbunyi perubahan wilayah hanya dapat disetujui melalui referendum yang diikuti oleh semua rakyat Ukraina, termasuk mereka yang tidak tinggal di Krimea. Jadi dengan penggabungan dua undang-undang dari dua negara yang terlibat konflik tersebut maka jelaslah bahwa Krimea adalah bagian dari Ukraina.

Menurut hukum internasional cara penambahan wilayah yang di benarkan adalah dengan cara damai tanpa kekerasan. Piagam PBB pasal 2 ayat 4 dengan jelas menyatakan larangan untuk menambah wilayah dengan kekerasan. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut, dalam melaksanakan hubungan internasional, semua anggota harus mencegah tindakantindakan yang berupa ancaman atau kekerasan terhadap kedaulatan atau kemerdekaan negara lain.

Cara memperoleh yang dibenarkan oleh hukum internasional adalah okupasi (wilayah yang sebelumnya belum pernah menjadi bagian dari kedaulatan suatu bangsa) akkresi (penambahan wilayah secara alamiah), prespeksi (memperoleh wilayah dengan cara okupasi secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama), cessi (penyerahan wilayah dengan suka rela atau paksaan karena perang), sedangkan aneksasi atau

penaklukan (penggabungan suatu wilayah lain dengan paksaan atau paksaan kedalam wilayah yang menganaeksasi) tidak di benarkan.

Sedangkan referendum adalah cara memperoleh wilayah melalui pilihan penduduk yang bersangkutan. Referendum adalah cara damai dengan pemungutan suara oleh penduduk suatu wilayah. Dari penjabaran di atas jelas sekali bahwa Rusia tidak menganeksasi Krimea yang selama ini di tuduhkan, jika melihat piagam PBB maka seharusnya permasalahan ini tidak berlarutlarut, tetapi referendum yang dilakukan oleh penduduk Krimea tidak mendapat persetujuan dari negara induk yaitu Ukraina walaupun demikian untuk menekan Ukraina agar mau menjadi bagian Rusia dan menolak kesepakatan dengan Uni Eropa maka Krimea tetap diduduki demi kepentingan Rusia baik dari segi politik, ekonomi, keamanan dan ideologi, maka Disinilah konflik tersebut terus hingga saat ini.

Konsekuensi dari referendum Krimea yang tidak mendapat pengakuan dari banyak negara ini, menyebabkan Rusia Jurnal Poros Politik ISSN : 2528 – 0953 14 mendapatkan beberapa sanksi yakni sanksi ekonomi, dan sanksi politik dari berbagai negara seperti: Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Norwegia, Jepang, Ukraina, Georgia, Australia, dan Selandia Baru. Rusia menganggap pemerintah Ukraina menjadi penyebab tidak selesainya konflik di Ukraina Timur karena hanya ingin mengembalikan kontrol pemerintah tanpa memberikan hak otonomi yang telah dijanjikan sebelumnya. Sebaliknya Ukraina dan negara-negara Barat menuduh Rusia ikut campur di Ukraina Timur dan meminta segera menghentikan tindakannya sehingga masalah dapat diselesaikan. Rusia sendiri mengaku tidak ikut campur sama sekali, dan menekankan bahwa masalah harus diselesaikan melalui berbicara langsung dengan penduduk Ukraina Timur (setelah diberikannya hak otonomi khusus) memngingat bahawa hasil referendum yang mayoritas masyarakat di wilayah Ukraina Timur menginginkan bergabung kembali pada Federasi Rusia. Sanksi politik ini dimulai dari ketidakpercayaan dari setiap negara yang berkonflik taerhadap vaksin covid-19, pengusiran diplomat Rusia dari beberapa negara di Eropa seperti: Jerman, Polandia, Ceko, dan Slovakia, dan juga penarikan duta besar Rusia di Amerika Serikat, dan begitupula sebaliknya terjadi penarikan duta besar Amerika Serikat untuk Rusia.

Rusia berpendapat bahwa sanksi sepihak tersebut merupakan langkah diplomatis yang bertujuan untuk melemahkan pengaruh politik Rusia di kawasan Eropa, sehingga

dengan begitu akan lebih mudah bagi negara-negara pro-Barat untuk melakukan protes terhadap intervensi Rusia. Namun tak lama setelahnya Rusia menjawab sanksi tersebut dengan memberikan sanksi balasan berupa larangan bagi sebagian warga dan perusahaan-perusahaan negara di atas untuk memasuki wilayah Federasi Rusia, juga menghentikan impor produk makanan dari negara-negara tersebut. Hal ini tentunya semakin memperkeruh hubungan kedua belah pihak.

Meski langkah ini disanksikan banyak pihak, namun hal tersebut akan mendorong Eropa dan AS untuk menjatuhkan sanksi ekonomi berupa pembatasan atau pemblokiran ekspor komoditas utama Rusia seperti aluminium, nikel, paladium, platinum, dan yang utama adalah migas. Kebijakan tersebut bisa saja terjadi karena material itu adalah produk utama serta pasokan penting bagi perusahaan produsen milik AS dan Eropa. Kehilangan sumber pasokan dunia yang penting akan mendorong kenaikan harga pasar. Namun hal itu bisaberdampak sebaliknya. Tak hanya buruk bagi Rusia tapi juga Eropa dan AS. Karena hal ini akan menyebabkan inflasi bagi Amerika Serikat (AS) dan banyak negara Barat. Pasar minyak dan gas alam juga diyakini akan terguncang. Karena Rusia adalah produsen utama dari minyak dan gas di Eropa. Tetapi penutupan ekspor energi Rusia tidak mungkin terjadi karena Eropa terlalu bergantung pada energi Rusia sehingga hampir tidak mungkin bagi negara yang berada di Kawasan Uni Eropa untuk memboikot atau bahkan memasukkannya ke dalam daftar sanksi ekonomi.

Sanksi lain yang ditujukan Amerika dan Uni Eropa adalah sanksi kepada beberapa Bank Rusia dan juga perusahaan minyak Rosneft. Sanksi tersebut bertujuan untuk melarang semua perusahaan minyak dan mineral yang dikontrol negara untuk menerima dana dalam pasar modal Eropa. Akibatnya Rusia akan kehilangan sebagian pasarnya akibat sanksi tersebut, belum lagi dana lain yang tersimpan di bank-bank Eropa. Hasil ekspor utama Rusia yang turun 50% menyebabkan turunnya kurs mata uang Rubel dengan sangat cepat di banding mata uang lain, kejadian ini menyebabkan perlambatan ekonomi dan menyebabkan krisis keuangan di Rusia menjadi semakin parah.

Disisi lain Rusia juga membutuhkan pendapatan dari penjualan energi untuk mempertahankan ekonomi yang stagnan. Faktor tersebut akan berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi Rusia jika menghadapi sanksi baru sambil membiayai operasi

militer besar. Apabila serangan ke Ukraina benar terjadi, maka hal tersebut mustahil dilakukan. Rusia akan tetap mengirimkan minyak dan gas ke Eropa bahkan jika perang dilakukan. Harga minyak dan gas pun kemungkinan akan melonjak. Karena kurangnya bahan baku ekspor, perusahaan minyak pun diyakini akan menunda investasi untuk mengukur konflik, dan uang justru akan mengalir ke aset yang lebih aman, seperti surat berharga dan lain sebagainya, hal tersebut akan meningkatkan suku bunga, dan memperkuat dolar. Invasi penuh akan mengarahkan ekonomi Eropa ke dalam resesi. Hal ini juga akan berdampak pada pertumbuhan PDB AS.

Efek Serangan Rusia Ke Ukraina Pada Dunia

Perang Rusia vs Ukraina yang terus terjadi membawa efek domino terhadap perekonomian, mulai terhadap ekspor hingga ketahanan pangan. Serangan Rusia ke Ukraina yang membawa efek berantai itu bahkan menjadi perbincangan utama dalam pertemuan para menteri keuangan negara G20 Indonesia. Berdasarkan Kajian Tengah Tahun Institute for Development of Economics and Finance (Indef), perang Rusia vs Ukraina disinyalir berpengaruh sangat besar terhadap pemangkasan pertumbuhan ekonomi global. Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global, dari semula 4,1 persen menjadi hanya 2,9 persen. Indef menilai bahwa invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan adanya pembatasan akses gas, minyak, dan komoditas, sehingga imbasnya terjadi kenaikan harga energi, komoditas, hingga pangan. Kondisi itu tidak hanya mengganggu perekonomian di wilayah Eropa Timur, tetapi juga terhadap dunia secara keseluruhan.

Perang Rusia-Ukraina menyebabkan gangguan yang lebih besar terhadap rantai pasok global. Akibatnya, prospek pemulihan ekonomi sangat bergantung pada durasi perang kemampuan mengatasi gangguan aliran komoditas, tertulis dalam keterangan resmi Kajian Tengah Tahun Indef, dikutip pada Sabtu (9/7/2022). Indef menyebut bahwa disrupsi rantai pasok global menggerakkan kenaikan harga komoditas, sehingga menyebabkan inflasi tinggi di banyak negara. Sayangnya, di tengah berbagai keterbatasan pasokan barang saat rantai pasok terhambat, banyak negara yang justru melakukan pembatasan ekspor. "Alih-alih melakukan promosi ekspor, kini banyak negara yang melakukan restriksi ekspor, khususnya terhadap produk pangan. Restriksi ekspor ini diduga kuat karena setiap negara ingin mengutamakan pemenuhan pasokan domestiknya di tengah carut marut rantai pasok. Akibatnya, supply bahan baku impor

untuk industri terancam langka," tertulis dalam kajian Indef. Berdasarkan kajian Indef, ketergantungan Indonesia pada impor gandum, kedelai, daging, farmasi, energi, dan mesin berteknologi tinggi akan berdampak terhadap naiknya biaya produksi.

Indef menilai bahwa perlu adanya pembenahan serius oleh pemerintah agar perekonomian bisa kuat bertahan di segala situasi. Indef berkaca dari kinerja ekspor Indonesia yang mengalami penurunan setelah invansi Rusia ke Ukraina, sebagai 'alarm' penurunan permintaan global. Nilai ekspor Indonesia pada Mei 2022 mencapai US\$21,51 miliar atau turun 21,29 persen dibanding April 2022. Beruntungnya, secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia pada Januari—Mei 2022 mencapai US\$114,97 miliar atau naik 36,34 persen dibanding periode yang sama tahun 2021. Menurut Indef, kenaikan ekspor periode Januari—Mei 2022 itu antara lain disebabkan oleh low base effect. Artinya, kinerja ekspor tahun lalu merupakan kondisi lebih rendah dibandingkan kondisi saat ini. "Oleh karena itu, penurunan kinerja ekspor di Mei 2022 perlu menjadi alarm kewaspadaan akan mulai menyusutnya permintaan global," tertulis dalam kajian itu.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel : <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220709/9/1553088/perang-rusia-vs-ukraina-gak-kelar-kelar-ini-dampaknya-ke-perekonomian>. Author: Wibi Pangestu Pratama